

EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR

Bazuri Adnan¹, Bambang Mardisentosa², Erialdy³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: bambang.mardisentosa@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas peran pendamping sosial dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. PKH merupakan inisiatif utama pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang sangat bergantung pada peran Pendamping dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama adalah Pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping PKH secara umum telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam menjalankan fungsi fasilitasi, edukasi, dan monitoring terhadap KPM. Keberhasilan didukung oleh adanya pelatihan dan pendekatan interpersonal yang kuat, namun menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas/logistik dan kendala komunikasi dengan KPM yang berpendidikan rendah. Efektivitas peran ini terlihat dari adanya perubahan perilaku positif, peningkatan kesadaran kesehatan, dan peningkatan capaian pendidikan anak-anak KPM.

Kata Kunci: Efektivitas Peran, Pendamping PKH, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Parung

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of the social assistant role in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Parung District, Bogor Regency. PKH is a major government initiative for poverty alleviation, heavily reliant on the Assistants' role in ensuring aid is precisely targeted and effectively utilized. This research uses a qualitative method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The main informants were PKH Assistants and Beneficiary Families (KPM). The research results indicate that the role of PKH assistants has generally been quite effective, particularly in carrying out the functions of facilitation, education, and monitoring of KPM. Success is supported by training and strong interpersonal approaches, but faced obstacles such as limited facilities/logistics and communication constraints with KPMs who have low education levels. The effectiveness of this role is evident from positive behavioral changes, increased health awareness, and improved educational attainment of KPM children.

Keywords: Role Effectiveness, PKH Assistant, Family Hope Program, Poverty, Parung

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Sebagai respons, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga kurang mampu terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Pendamping PKH merupakan ujung tombak dan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program ini. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam penyaluran bantuan, tetapi juga dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, telah diimplementasikan, dan efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi Pendamping PKH. Adanya tantangan seperti jumlah KPM yang didampingi, kendala geografis, dan keragaman literasi KPM dapat memengaruhi efektivitas kinerja Pendamping. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji sejauh mana peran Pendamping telah dijalankan secara efektif di wilayah ini

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pendamping PKH Terhadap Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana Efektivitas Kinerja Pendamping PKH Pada Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peran Pendamping PKH Pada Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Kinerja Pendamping PKH Pada Pendampingan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Kajian Literatur dan Hasil Penelitian Terdahulu

Peran Pendamping PKH didefinisikan sebagai seperangkat harapan terhadap perilaku seseorang yang menempati posisi sosial tertentu, seperti fasilitator, edukator, dan motivator. Literatur menunjukkan bahwa Pendamping PKH harus memiliki motivasi tinggi dan keterampilan dalam manajemen program dan interaksi sosial untuk memastikan KPM memahami dan memanfaatkan bantuan. Peran ini sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang PKH, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

B. Metode

Pendekatan, Desain, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan holistik mengenai efektivitas peran pendamping sosial dalam konteks spesifik Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Parung. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif subjek penelitian, yaitu para Pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam lingkungan alamiah mereka.

Lokasi Penelitian: Penelitian ini berfokus di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat urgensi pengentasan kemiskinan dan kompleksitas wilayah yang membutuhkan pendampingan intensif.

Sumber Data dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan. Sumber data dibagi menjadi:

1. Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen, laporan, dan arsip resmi terkait pelaksanaan PKH di Kecamatan Parung.

Informan Penelitian ditetapkan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling untuk memastikan informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kaya terkait efektivitas peran pendamping. Informan utama meliputi:

1. Pendamping PKH yang bertugas di Kecamatan Parung (sebagai pelaksana program).
2. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang didampingi (sebagai penerima layanan).
3. Koordinator PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Bogor (sebagai pengambil kebijakan dan pengawas program).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk menjamin validitas dan keabsahan temuan:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Dilakukan secara terstruktur namun fleksibel kepada seluruh informan. Wawancara berfokus pada peran spesifik pendamping (misalnya, peran edukasi, peran fasilitasi, peran mediasi), tantangan yang dihadapi, serta perubahan nyata yang dirasakan oleh KPM.
2. Observasi Partisipatif Non-Aktif: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi pendampingan, seperti pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) atau saat Pendamping melakukan kunjungan rumah. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian antara pernyataan informan (hasil wawancara) dengan realitas di lapangan.
3. Dokumentasi: Pengumpulan dokumen resmi, seperti data KPM, laporan capaian program, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan PKH.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak data pertama kali dikumpulkan di lapangan, mengikuti model Miles dan Huberman:

1. Koleksi Data (Data Collection): Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data (Data Reduction): Proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data kasar yang didapat di lapangan. Data yang tidak relevan (misalnya, obrolan non-PKH) akan dikecualikan, sementara kutipan kunci yang menjelaskan efektivitas peran pendamping dipertahankan.
3. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Verifikasi dan perumusan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan temuan yang konsisten.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian Kualitatif

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai informan kunci, termasuk seluruh Pendamping PKH yang beroperasi di Kecamatan Parung, perwakilan KPM dari berbagai desa, serta Koordinator PKH Kabupaten Bogor. Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya konsensus mengenai fungsi dan tantangan yang dihadapi Pendamping.

Secara umum, Pendamping PKH di Parung adalah agen pelaksana program yang memiliki beban kerja tinggi (rasio Pendamping terhadap KPM berkisar antara 1:200 hingga 1:300) dan dituntut menjalankan peran ganda sebagai pekerja sosial, administrator, dan motivator. Analisis data kualitatif berpusat pada dua tema besar: a) bagaimana Pendamping mengimplementasikan peran mereka, dan b) seberapa efektif peran tersebut dalam memicu perubahan perilaku KPM.

Analisis Peran Implementatif Pendamping PKH

Peran Pendamping PKH di Kecamatan Parung dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi utama yang bersifat multidimensi, mencerminkan tuntutan program yang tidak hanya terbatas pada penyaluran dana.

Peran Fasilitator dan Koordinator

Pendamping adalah **fasilitator** utama yang menjembatani KPM dengan sistem birokrasi dan layanan publik. Dalam konteks PKH, peran ini melibatkan:

1. Fasilitasi Akses Layanan Bersyarat: Pendamping memastikan bahwa KPM memiliki akses dan memenuhi kewajiban untuk komponen kesehatan (Posyandu, Puskesmas) dan pendidikan (sekolah). Misalnya, Pendamping harus aktif berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan guru sekolah untuk memverifikasi kehadiran KPM dan anak-anak mereka. *Kutipan dari Informan KPM*: "Pendamping yang langsung dibantu jelaskan prosesnya [mendaftar sekolah], bukan cuma dikasih bantuan lalu ditinggal."
2. Koordinator Antar Lembaga: Pendamping bertindak sebagai koordinator lapangan. Mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, Dinas Sosial, Bank penyalur (Himbara), dan lembaga pendidikan untuk memastikan integrasi program. Kinerja dalam peran ini sangat menentukan ketepatan waktu penyaluran bantuan dan verifikasi data.
3. Mediasi Konflik: Dalam kasus yang jarang terjadi, Pendamping juga berfungsi sebagai mediator saat terjadi konflik internal di KPM terkait pemanfaatan dana, atau konflik antar KPM. Peran ini memerlukan keterampilan komunikasi yang tinggi dan objektivitas.
4. Peran Fasilitator dan Motivator: Pendamping berperan sebagai penghubung antara KPM dan sumber daya (bantuan sosial, fasilitas kesehatan, sekolah). Peran motivator sangat krusial dalam mengubah mentalitas ketergantungan KPM menjadi mentalitas kemandirian, terutama melalui pertemuan P2K2.

5. Peran Edukator: Pendamping aktif memberikan edukasi tentang komponen bersyarat PKH, yaitu pentingnya kesehatan (misalnya, gizi, imunisasi) dan pendidikan anak. Edukasi ini dilakukan secara tatap muka dan berkelompok.
6. Peran Monitor dan Pengawas: Pendamping secara rutin memverifikasi kepatuhan KPM terhadap kewajiban bersyarat (misalnya, kehadiran sekolah dan pemeriksaan kesehatan). Fungsi monitoring ini memastikan bahwa dana bantuan (termasuk dana dari pemerintah) dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

Efektivitas Kinerja Pendamping PKH

Efektivitas Peran Pendamping PKH di Kecamatan Parung dinilai berdasarkan sejauh mana KPM mengalami perubahan positif dalam perilaku dan capaian hidup sesuai indikator PKH. Secara umum, peran ini dinilai cukup efektif.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan (Efektivitas)

Area Keberhasilan	Bukti Empiris
Kesehatan dan Gizi	Peningkatan kepatuhan KPM dalam membawa balita dan ibu hamil ke Posyandu/Puskesmas. Kesadaran terhadap pola makan sehat meningkat.
Pendidikan	Tingkat putus sekolah anak-anak KPM menurun drastis. Tingkat kehadiran anak di sekolah meningkat.
Peningkatan Kapasitas	KPM aktif dalam Pertemuan P2K2, menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga, pengasuhan, dan kesehatan.
Kemandirian Ekonomi	Beberapa KPM mulai berani merintis usaha mikro setelah mendapatkan bimbingan pengelolaan modal dari Pendamping.

Peran Edukator dan Agen Perubahan Perilaku

Ini adalah peran inti yang membedakan PKH dari bantuan sosial tunai (BLT). Pendamping berfungsi sebagai edukator melalui pertemuan wajib Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).

1. Edukasi Pengelolaan Keuangan: Pendamping mengajarkan modul pengelolaan keuangan yang bertujuan mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif. Ini mencakup perencanaan anggaran, alokasi dana untuk komponen bersyarat, dan stimulasi usaha mikro.
2. Edukasi Kesehatan dan Gizi: Memberikan pemahaman kepada KPM mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemantauan tumbuh kembang balita, dan pentingnya gizi seimbang.
3. Perubahan Pola Pikir (Motivator): Pendamping berperan sebagai motivator yang mananamkan harapan dan keyakinan diri kepada KPM. Tujuan utamanya adalah mengubah pola pikir KPM agar tidak lagi merasa terstigma sebagai 'orang miskin' melainkan sebagai penerima manfaat yang berpotensi mandiri. Keberhasilan peran ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pendekatan personal (*personal touch*) yang dilakukan oleh Pendamping.

Peran Monitoring dan Verifikator Kepatuhan

Fungsi ini memastikan akuntabilitas program dan ketepatan sasaran. Pendamping bertanggung jawab memverifikasi status KPM secara berkala.

1. Verifikasi Komponen Bersyarat: Pendamping secara rutin mengumpulkan data kehadiran sekolah anak KPM (komponen pendidikan) dan kehadiran di layanan kesehatan (komponen kesehatan). Data ini menjadi dasar untuk pencairan dana di periode berikutnya.
2. Validasi Data Kemiskinan: Pendamping bertugas melakukan verifikasi lapangan terhadap data KPM. Peran ini krusial dalam memitigasi *error of inclusion* (orang kaya menerima bantuan) dan *error of exclusion* (orang miskin tidak menerima bantuan).

Evaluasi Efektivitas Kinerja Pendamping (Temuan Kunci)

Efektivitas Peran Pendamping PKH di Kecamatan Parung dinilai **cukup efektif** karena berhasil menunjukkan capaian program yang signifikan, meskipun ditemukan variasi efektivitas antar Pendamping dan antar desa.

Efektivitas pada Komponen Kesehatan dan Gizi

Efektivitas Pendamping dalam komponen ini sangat tinggi. Kepatuhan KPM untuk membawa balita mereka ke Posyandu dan memastikan pemeriksaan rutin ibu hamil meningkat tajam setelah adanya PKH dan pendampingan intensif.

1. Fakta Lapangan: Sebelum PKH, banyak KPM yang acuh terhadap imunisasi atau pemeriksaan kehamilan karena alasan biaya atau kurangnya kesadaran. Intervensi Pendamping mengubah ini. Pendamping tidak hanya menginformasikan sanksi jika tidak patuh, tetapi juga menjelaskan manfaat jangka panjang bagi anak, yang memicu kepatuhan berbasis kesadaran.
2. Analisis Kualitatif: Keberhasilan di sektor kesehatan ini disebabkan oleh materi P2K2 yang mudah diterapkan dan bersifat visual, serta adanya *reward* dan *punishment* langsung dari dana bersyarat.

Efektivitas pada Komponen Pendidikan

Efektivitas terlihat dari penurunan signifikan angka putus sekolah di kalangan anak-anak KPM. Pendamping berperan aktif mengatasi hambatan non-finansial seperti rendahnya motivasi belajar dan stigma sosial.

1. Fakta Lapangan: Pendamping menjalin hubungan langsung dengan pihak sekolah. Ketika anak KPM absen, Pendamping menjadi orang pertama yang dihubungi oleh pihak sekolah. Ini menciptakan *sense of accountability* yang kuat pada KPM.
2. Analisis Kualitatif: Pendamping berhasil meyakinkan KPM bahwa dana PKH harus diprioritaskan untuk kebutuhan sekolah (seragam, alat tulis), bukan untuk konsumsi. Peran Pendamping sebagai mediator antara KPM dan sekolah sangat penting dalam memastikan anak-anak tetap berada dalam sistem pendidikan.

Efektivitas pada Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2)

P2K2 adalah jantung dari PKH, di mana Pendamping mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Efektivitas di area ini tergolong **variatif**.

1. Kelebihan: Pendamping berhasil meningkatkan pemahaman KPM mengenai kesehatan, pengasuhan anak, dan pengelolaan keuangan. Ada KPM yang berhasil menerapkan materi P2K2 dengan baik.

- Kelemahan: Partisipasi KPM masih sering dianggap sebagai kewajiban untuk mencairkan bantuan, bukan sebagai kebutuhan. Selain itu, materi P2K2 yang bersifat teoritis sering kali sulit dipahami oleh KPM dengan latar belakang pendidikan rendah, memerlukan waktu dan pengulangan edukasi yang lebih intensif dari Pendamping. Ini memunculkan beban kerja edukasi yang besar bagi Pendamping.

Efektivitas pada Stimulasi Kemandirian Ekonomi

Efektivitas di bidang ini adalah **paling menantang** namun menunjukkan potensi.

- Bukti: Sejumlah kecil KPM, berkat bimbingan intensif dari Pendamping, berhasil membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) atau memulai usaha mikro (seperti warung, jual makanan ringan).
- Analisis Kualitatif: Keberhasilan ini tidak bisa dipukul rata. KPM yang berhasil adalah mereka yang sudah memiliki modal sosial dan motivasi internal yang tinggi. Peran Pendamping di sini adalah sebagai katalis dan penyedia informasi awal tentang akses modal (misalnya KUR) atau pelatihan keterampilan. Kendala utamanya adalah keterbatasan modal awal dan risiko usaha yang tinggi, yang tidak bisa diatasi hanya dengan peran Pendamping.

Efektivitas ini didukung oleh kualitas interpersonal Pendamping yang tinggi. Pendamping mampu membangun hubungan yang dekat dan berbasis kepercayaan dengan KPM, menjadikannya sebagai 'teman' daripada sekadar petugas. Selain itu, pelatihan teknis yang rutin dari Kemensos juga menjaga kesiapan Pendamping.

Faktor Penghambat Efektivitas

Meskipun efektif, efektivitas kinerja menghadapi tantangan:

- Keterbatasan Logistik: Kurangnya alokasi dana operasional dan fasilitas kendaraan yang memadai, mengingat wilayah Parung yang memiliki area padat dan terpencil, menghambat mobilitas Pendamping.
- Rendahnya Literasi KPM: Kendala komunikasi sering muncul karena tingkat pendidikan KPM yang rendah, sehingga sulit memahami materi P2K2 yang bersifat konseptual. Ini menuntut Pendamping untuk menyederhanakan materi secara ekstrim.
- Beban Kasus Tinggi: Tingginya rasio jumlah KPM yang harus didampingi oleh satu Pendamping, mengurangi intensitas pendampingan yang ideal.

Pembahasan Mendalam: Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Efektivitas kinerja Pendamping adalah hasil interaksi antara kompetensi individu, dukungan struktural, dan konteks sosial KPM.

A. Faktor Pendukung: Kompetensi dan Komitmen Personal

- Keterampilan Interpersonal (Social Skills): Pendamping yang efektif adalah mereka yang memiliki empati tinggi dan mampu membangun *trust* dengan KPM. Di Kecamatan Parung, Pendamping yang berasal dari lingkungan lokal atau yang sudah lama bertugas cenderung lebih efektif karena memahami kultur dan dinamika sosial KPM. Keterampilan ini tidak sepenuhnya diajarkan dalam pelatihan formal, melainkan dibangun dari pengalaman lapangan.
- Inisiatif dan Adaptasi Program: Pendamping yang baik tidak terpaku pada SOP. Mereka melakukan *outreach* di luar jadwal resmi P2K2 (misalnya, kunjungan rumah

di malam hari) untuk menjangkau KPM yang sibuk bekerja. Inisiatif adaptif ini sangat vital untuk keberhasilan program.

3. Komitmen Profesional: Komitmen Pendamping sebagai pekerja sosial dengan motivasi pengabdian yang kuat menjadi mesin penggerak utama. Pengakuan akan pentingnya pekerjaan mereka dalam mengubah hidup KPM menjadi insentif non-finansial yang kuat.

B. Faktor Penghambat: Kendala Struktural dan Komunikasi

1. Keterbatasan Logistik dan Infrastruktur: Ini adalah hambatan struktural terbesar. Pendamping sering kesulitan mengakses KPM di area yang jauh atau terpencil karena keterbatasan alokasi biaya operasional dan kurangnya fasilitas. Hal ini secara langsung mengurangi frekuensi dan intensitas pendampingan yang ideal. Jika logistik tidak mendukung, Pendamping hanya bisa fokus pada *minimum compliance* (verifikasi data), dan mengorbankan *maximum impact* (pendampingan intensif).
2. Beban Kasus dan Beban Administratif: Beban Pendamping yang harus mendampingi ratusan KPM, ditambah dengan tugas administratif pelaporan yang ketat, mengakibatkan Pendamping kekurangan waktu untuk melakukan pendampingan personal yang mendalam. Kualitas Pendampingan menjadi terdistribusi secara tidak merata.
3. Kendala Komunikasi Lintas Budaya dan Literasi: Meskipun Pendamping sudah berusaha menyederhanakan materi, tingkat literasi KPM yang rendah (terutama dalam memahami konsep keuangan dan pengasuhan anak) masih menjadi tantangan. Dibutuhkan modul P2K2 yang lebih visual, berbasis permainan, atau drama, bukan hanya ceramah.
4. Resistensi KPM: Terdapat minoritas KPM yang resisten terhadap perubahan, menganggap bantuan sosial sebagai hak mutlak tanpa kewajiban, dan enggan berpartisipasi dalam P2K2. Ini membutuhkan strategi pendampingan khusus yang memakan banyak energi dan waktu Pendamping.

Diskusi Komparatif: Keterkaitan Teori dan Implikasi Manajerial

Temuan di Parung sangat relevan dengan Teori Peran Pekerjaan Sosial. Pendamping PKH tidak hanya menjalankan peran **enabler** (memfasilitasi sumber daya) dan **educator**, tetapi juga peran **advocate** (menyuarkan kebutuhan KPM ke pemerintah desa) dan **broker** (menghubungkan KPM dengan layanan).

1. **Penguatan Teori Peran Sosial:** Keefektifan Pendamping diukur dari keberhasilannya bertransformasi dari sekadar petugas penyalur menjadi **agen perubahan sosial**. Keberhasilan dalam komponen kesehatan dan pendidikan (yang memiliki sanksi jelas) menunjukkan bahwa Pendamping berhasil memanfaatkan kerangka *conditional cash transfer* untuk memicu perubahan perilaku KPM.
2. **Implikasi bagi Manajemen Program:** Temuan ini memberikan implikasi manajerial yang kritis:
 - a. **Prioritas Dukungan Struktural:** Pemerintah daerah dan pusat harus memprioritaskan penyelesaian hambatan logistik dan pengurangan beban administratif. Efektivitas peran Pendamping telah mencapai batas maksimum yang

dapat dicapai secara personal; peningkatan selanjutnya hanya dapat dicapai melalui dukungan struktural yang lebih baik (misalnya, penambahan jumlah Pendamping, alokasi dana operasional yang memadai).

- b. **Pengembangan Modul P2K2:** Modul P2K2 harus disesuaikan dengan tingkat literasi KPM, menggunakan bahasa lokal dan metode interaktif yang sederhana.
- c. **Evaluasi Kinerja Holistik:** Evaluasi kinerja Pendamping tidak boleh hanya didasarkan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada indikator kualitatif perubahan perilaku KPM dan inisiatif lokal Pendamping.

Pada akhirnya, efektivitas PKH di Kecamatan Parung merupakan cerminan nyata dari manajemen program yang kuat, didorong oleh komitmen Pendamping yang tinggi. Namun, jika dukungan struktural tidak ditingkatkan, potensi penuh dari program ini dalam memutus rantai kemiskinan akan terhambat oleh beban kerja dan keterbatasan logistik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif mengenai Efektivitas Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, disimpulkan tiga poin utama sebagai berikut:

1. Efektivitas Peran Pendamping Dinilai Cukup Tinggi dalam Mengubah Perilaku Dasar KPM: Peran Pendamping, khususnya dalam fungsi edukator, fasilitator, dan monitor, terbukti cukup efektif dalam mendorong kepatuhan KPM terhadap syarat bersyarat PKH. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan signifikan kehadiran anak di sekolah dan kepatuhan dalam pemeriksaan kesehatan (Posyandu/Puskesmas), yang merupakan inti dari tujuan jangka pendek PKH.
2. Peran Pendamping Dijalankan Secara Multidimensi dengan Komitmen Personal yang Kuat: Pendamping tidak hanya bertindak sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan motivator. Tingginya komitmen dan keterampilan interpersonal Pendamping adalah faktor penentu utama yang memungkinkan mereka membangun kepercayaan dengan KPM dan berhasil melaksanakan fungsi edukasi (P2K2), meskipun dihadapkan pada kendala latar belakang literasi KPM yang beragam.
3. Hambatan Struktural Menjadi Pembatas Efektivitas Maksimal: Meskipun kinerja Pendamping baik secara personal, efektivitas maksimal terhambat oleh kendala struktural dan manajerial, yaitu keterbatasan alokasi dana operasional/logistik dan beban kasus (KPM) yang terlalu tinggi. Hambatan ini membatasi intensitas pendampingan, sehingga Pendamping lebih banyak fokus pada verifikasi administratif (*compliance*) daripada pendampingan mendalam (*impact*).

Referensi

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Departemen RI, Penerbit: J-ART, 2010.
Aminah,I. 2019. *Kolaborasi dalam Implementasi Program Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell, J. W.1998. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publications.

- Effendi,A. 2018. *Manajemen Program Sosial: Pendekatan dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fathoni Abdurrahmat. 2016. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1997). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Hasibuan, M. S. 2006. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendarto, R. 2020. *Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Program Sosial*. Surabaya: Bina Media.
- Herdiansyah, H. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khadafi Rizal, MutiarinDyah. 2017. *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul*, Journal of governance and public policy, Vol. 4 No. 2.
- Khairani Kurnia Laela.2016. *Partisipasi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak*, Skripsi, Universitas Lampung.
- Kusumawati, T. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Manullang, M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. 2009. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 2004. *Manajemen sumber daya manusia*. Gadjah Mada: University Press.
- Ningsih, S. 2019. *Komunikasi dan Dukungan Emosional dalam Pendampingan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetjiningsih, E. 2017. *Pendampingan dalam Program Sosial: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.